

LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR SUAR ARTHA DHARMA
TAHUN 2025



JL. Sunset Road Pertokoan Plaza no 2-3 Seminyak Kuta Badung
TELEPON: (0361)8476789

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR

Nama BPR/BPRS	PT BPR Suar Artha Dharma
Alamat	Jl. Sunset Road Pertokoan Plaza Sunset Road No. 2-3 Seminyak Kuta
Nomor Telepon	(0361) 8476789

Penjelasan Umum:

BPR Suar Artha Dharma memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Suar Artha Dharma dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Badung. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Suar Artha Dharma didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan BPR Suar Artha Dharma.

BPR Suar Artha Dharma telah beroperasi selama 19 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi bank besar, sehat dan dipercaya dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Suar Artha Dharma selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2024 dan untuk di tahun mendatang, BPR Suar Artha Dharma terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola **2. Baik**

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama Ir. I Ketut Karya
Jabatan Direktur Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Direksi wajib menindaklanjuti:

- a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan auditor ekstern; dan
- b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

2. Nama I Gusti Ayu Ngurah Sulastrini S.TP
Jabatan Direktur YMF Kepatuhan

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
 - b. memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
2. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah:
 - a. menetapkan langkah yang diperlukan dengan melakukan pencegahan secara optimal; dan/atau
 - b. menindaklanjuti penyimpangan sesuai dengan tugasnya, namun masih terjadi penyimpangan, tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbatas pada kewenangan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu: Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan

kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Suar Artha Dharma.

- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama I Wayan Wirta B.Sc
Jabatan Komisaris Utama

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan
 - b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat.

2. Nama Luh Sarini SH.,MH
Jabatan Komisaris

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati hatian sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS.
2. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
 3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perekonomian rakyat; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
 5. Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
 6. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan
 - b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perekonomian rakyat.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank agar selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu: Evaluasi kinerja (minimal periode triwulan) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Suar Artha Dharma.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil, karena modal inti dibawah 50M

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ir. I Ketut Karya
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Gusti Ayu Ngurah Sulastrini S.TP
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Wayan Wirta B.Sc
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Luh Sarini SH.,MH
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Tidak ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Ir. I Ketut Karya
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	I Gusti Ayu Ngurah Sulastrini S.TP
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	I Wayan Wirta B.Sc
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Luh Sarini SH.,MH
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Ir. I Ketut Karya
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	I Gusti Ayu Ngurah Sulastrini S.TP
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	I Wayan Wirta B.Sc
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Luh Sarini SH.,MH
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

	Nama	Ir. I Ketut Karya
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Gusti Ayu Ngurah Sulastrini S.TP
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Wayan Wirta B.Sc
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Luh Sarini SH.,MH
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Ir. I Ketut Karya
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	I Gusti Ayu Ngurah Sulastrini S.TP
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	I Wayan Wirta B.Sc
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Luh Sarini SH.,MH
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp328.300.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp205.800.000

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp106.000.000
Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp20.000.000

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp105.634.092
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp70.422.728

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

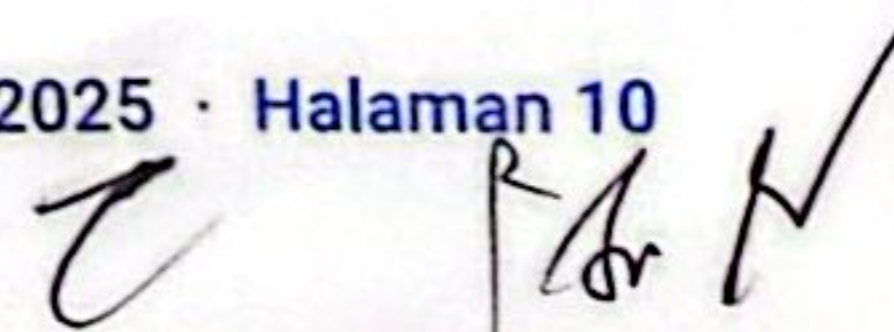
Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp39.750.000
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp23.790.000
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0



2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp7.680.000
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	2 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp5.848.000

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Suar Artha Dharma pada tanggal 28 Februari 2025

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,54 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	3,77 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,45 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b) 2,57 : 1

5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b) 3,72 : 1

Gaji Terendah Direksi diberikan selama 6 bulan karena terdapat kekosongan jabatan Direksi

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1. Tanggal Rapat 13 Januari 2025

Jumlah Peserta 4 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Membahas tentang Usulan Remunerasi dan Nominasi Pengurus Tahun 2025 kepada Pemegang Saham

2. Tanggal Rapat 10 Maret 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

- I. Target & Realisasi RBB
- II. Evaluasi RBB
- III. Rekomendasi Solusi dan Nasihat Penanganan Permasalahan
- IV. Follow Up Hasil Pemeriksaan OJK & KAP

3. Tanggal Rapat 12 Maret 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Pengawasan Market Conduct

4. Tanggal Rapat 21 April 2025

Jumlah Peserta 2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

Evaluasi Triwulan I Tahun 2025 tentang :

- I. Evaluasi Terhadap Pencapaian Target RBB
- II. Isu -Isu Strategis BPR
- III. Pengawasan Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM
- IV. Rencana Bisnis BPR
- V. Evaluasi / Penetapan Kebijakan Strategis



5.	Tanggal Rapat	14 Mei 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: I. Target & Realisasi RBB II. Evaluasi Kinerja III. Sumber Daya Manusia / SDM IV. Follow Up Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) OJK		
6.	Tanggal Rapat	11 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Triwulan II Tahun 2025 tentang : I. Rencana Bisnis BPR II. Isu Strategis BPR III. Penetapan Kebijakan Strategis IV. Manajemen Risiko		
7.	Tanggal Rapat	13 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan: Evaluasi Triwulan III Tahun 2025 tentang : I. Rencana Bisnis BPR II. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis III. Isu Strategis		
8.	Tanggal Rapat	06 November 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
Topik/Materi Pembahasan: I. Rencana Bisnis BPR II. Penerapan APU, PPT & PPPSPM III. Pelaksanaan Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan		
9.	Tanggal Rapat	08 Desember 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
Topik/Materi Pembahasan: Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2026		
10.	Tanggal Rapat	12 Januari 2026
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		

[Handwritten signature]

Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025 tentang :

- I. Rencana Bisnis BPR
- II. Isu Strategis BPR
- III. Evaluasi Realisasi RBB
- IV. Penerapan Fungsi Kepatuhan

1/ Usulan remunerasi dan Nominasi pengurus kepada RUPS dan telah dapat disetujui 2/ Evaluasi realisasi rencana Bisnis tahun 2025 setiap bulan, 3/Follow Up hasil pemeriksaan OJK & KAP seperti pengawasan Dewan komisaris atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU,PPT dan PPPSDM, meningkatkan fungsi dan pengawasan audit Intern, menyusun kebijakan benturan kepentingan,memastikan kehandalan Teknologi, Sistem Informasi dan Core Banking System, meningkatkan upaya pengamanan likuiditas , Evaluasi kelemahan dalam pembentukan CKPN dan penyelesaian SOP CKPN, 4/ Rekomendasi solusi dan nasehat penanganan permasalahan seperti penurunan NPL, 5/Isu-isu strategis BPR seperti meningkatkan DPK, penyaluran kredit sektor perdagangan eceran yang dipergunakan untuk modal kerja, 6/Menyarankan kepada Direksi untuk pemenuhan pembentukan kebijakan Remunerasi dan Nominasi karyawan, 7/ perlu ditingkatkannya Fungsi pengawasan satuan pengawasan Intern seperti penerapan APU,PPT DAN PPPSDM, 8/Evaluasi penetapan kebijakan Strategis seperti Imbalan Pasca Kerja, 9/ Pelaksanaan Edukasi Literasi dan Inklusi Keuangan realisasi semester I dilaksanakan berkolaborasi dengan BPR Tulus dan Bukit Tanjung tgl 23 Mei 2025 bertempat dihotel Natya, semester II berkolaborasi dengan BPR Tulus dan bukit tanjung tgl 6 Nopember 2025 di SMP 3 Kuta. 10/ Rapat pembahasan RBB tahun 2026 dengan Direksi 11/yaitu terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen dan masyarakat Pengawasan terhadap Market Conduct 12/ Pemenuhan Jumlah Anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan 14/ Melakukaqn evaluasi terhadap kredit hapus Buku dan Agunan yang diambil alih, 15/ Evaluasi kredit sindikasi dengan Arranger BPR Kirana karena ada 2 debitur mengalami macet yaitu CV Trimurti dan PT. Santis Jaya agar menjadi perhatian Direksi, 16/ Agunan yang diambil alih (AYDA) dari 3 debitur yang diambil alih 2 diantaranya sudah dapat terjual ayitu atas nama Made Yudana dan Kadek Tenny.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	I Wayan Wirta BSc
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	10 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Luh Sarini
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	10 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh anggota Dewan Komisaris.



15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus



Hukum Pada Tahun Laporan

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses	0 kasus

[Handwritten signature]

Hukum Pada Tahun Laporan

Selama periode tahun 2025 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Suar Artha Dharma.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
--	---------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	---------

Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
--	---------

Selama Periode Tahun 2025 (Tahun Pelaporan) tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama Periode Tahun 2025 (Tahun Pelaporan) tidak ada Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama Periode Tahun 2025 (Tahun Pelaporan) tidak terdapat Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik



Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT. BPR Suar Artha Dharma untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badung, 13 April 2026

PT. BPR Suar Artha Dharma

Disetujui oleh,


Ir. I Ketut Karya
Direktur Utama




I Gusti Ayu Ngurah Sulastrini S.TP
Direktur YMF Kepatuhan

Diketahui oleh,


I Wayan Wirta B.Sc
Komisaris Utama


Luh Sarini SH.,MH
Komisaris

FA